Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KRISIS AIR, KEDAULATAN, DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL: ANALISIS GERD ETHIOPIA DALAM KERANGKA SDG 6 TAHUN (2011–2024)

Agung Satia Gunawan[1], Teresa Carmelita[2], Alya Julianti Sari[3], Zahratul Hidayah[4]

[1.2.3.4)]Faculty of Social and Political Sciences Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available online Desember, 2025

2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id
2310412230@mahasiswa.upnvj.ac.id,

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A C T

Water scarcity and transboundary river management have become critical global issues, especially in regions where rapid development and population growth strain limited resources. The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) on the Blue Nile has heightened tensions between Ethiopia, Egypt, and Sudan due to competing national interests and hydro-political asymmetries. This study investigates how Ethiopia and Egypt utilize SDG 6 in their water diplomacy strategies and why negotiations among Ethiopia, Egypt, and Sudan have struggled to produce stable agreements during 2011–2024. Using a qualitative case study approach, the research analyzes official documents, international reports, and media sources, employing hydro-politics and power asymmetry as theoretical frameworks. Findings reveal that Ethiopia frames GERD as a sustainable development and energy project to legitimize its water use, while Egypt emphasizes equitable distribution and the protection of downstream water security. Sudan faces a dilemma, balancing the benefits of hydropower with concerns over dam safety. Differences in national interests, technical constraints, and interpretations of SDG 6 contribute to persistent negotiation deadlocks. The study concludes that while SDG 6 provides normative legitimacy, it cannot reconcile asymmetric power relations or conflicting national priorities, highlighting the limits of global sustainability norms in transboundary water conflicts.

Keywords: *GERD, SDG 6, transboundary water diplomacy, hydro-politics, power asymmetry.*

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ABSTRAK

Krisis air dan pengelolaan sungai lintas batas menjadi isu global yang penting, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang cepat sehingga menekan sumber daya air yang terbatas. Bendungan Grand Ethiopian Renaissance (GERD) di Sungai Nil Biru meningkatkan ketegangan antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan karena adanya kepentingan nasional yang bertentangan dan ketimpangan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Ethiopia dan Mesir menggunakan SDG 6 dalam strategi diplomasi air mereka serta mengapa negosiasi antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan sulit menghasilkan kesepakatan stabil selama periode 2011–2024. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menelaah dokumen resmi, laporan internasional, dan media, menggunakan teori *hydro-politics* dan *power asymmetry* sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ethiopia membingkai GERD sebagai proyek pembangunan berkelanjutan dan energi untuk melegitimasi pemanfaatan airnya, sementara Mesir menekankan distribusi air yang adil dan perlindungan keamanan air hilir. Sudan menghadapi dilema antara manfaat energi dengan risiko keselamatan bendungan. Perbedaan kepentingan nasional, hambatan teknis, dan perbedaan interpretasi SDG 6 menjadi faktor utama kebuntuan negosiasi. Kesimpulannya, meskipun SDG 6 memberikan legitimasi normatif, norma global ini tidak mampu menyatukan ketimpangan kekuasaan maupun kepentingan nasional yang bertentangan, menunjukkan keterbatasan norma keberlanjutan dalam konflik air lintas batas.

Kata kunci: GERD, SDG 6, diplomasi air lintas batas, *hydro-politics, power asymmetry*

PENDAHULUAN

Krisis air menjadi perhatian global karena kebutuhan manusia dan energi meningkat lebih cepat daripada kemampuan sumber air untuk pulih, sehingga pengelolaan air bersih menjadi prioritas internasional melalui SDG 6. Dalam perspektif hubungan internasional, isu ini menimbulkan ketegangan ketika sumber air melintasi batas negara, karena negara harus menyeimbangkan kepentingan domestik dengan norma global. Sungai Nil menjadi contoh penting, karena negara hulu dan hilir berbagi satu sumber air utama, namun memiliki posisi politik, kapasitas tawar, dan kebutuhan domestik yang berbeda. Cascão (2018) menekankan bahwa hubungan hulu–hilir di Nil lebih dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan daripada

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



faktor teknis, sedangkan Yihdego, Rieu-Clarke, dan Cascão (2017) menunjukkan bahwa Mesir telah menikmati posisi dominan dalam pengaturan air selama puluhan tahun, psehingga setiap upaya Ethiopia mengubah keseimbangan dianggap mengancam status quo. Temuan ini memberi dasar untuk membaca dinamika air di Nil melalui lensa ***hydro-politics***, yang menekankan peran kekuasaan dan kepentingan politik dalam pengelolaan sungai transnasional, serta kerangka ***power asymmetry*** yang membantu menganalisis bagaimana negara hilir dan hulu memanfaatkan norma global seperti SDG 6 untuk legitimasi dan strategi diplomasi.

Ketegangan meningkat tajam ketika Ethiopia memulai pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) pada 2011. Ethiopia memandang proyek ini sebagai simbol kemandirian energi dan percepatan pembangunan nasional, sementara Mesir dan sebagian Sudan khawatir pasokan air mereka terganggu. Sepanjang negosiasi 2011–2024, masing-masing negara juga mengaitkan posisi mereka dengan norma keberlanjutan dimana Ethiopia menekankan kontribusi GERD terhadap energi bersih dan pengelolaan air yang lebih efisien sesuai SDG 6, sedangkan Mesir menegaskan bahwa keberlanjutan juga berarti menjaga keadilan distribusi air bagi negara hilir. Periode 2011–2024 dipilih karena menandai fase kritis mulai dari pembangunan awal, pengisian waduk, hingga negosiasi multilateral dan intervensi aktor eksternal, sehingga memungkinkan analisis strategi negara, *framing* normatif, dan interaksi diplomatik secara menyeluruh. Studi sebelumnya sebagian besar menekankan aspek legal, teknis, atau keamanan air, sedangkan bagaimana norma global seperti SDG 6 dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi, diplomasi, dan kontestasi politik lintas negara masih kurang dijelaskan. Kekosongan ini menjadi titik fokus penelitian, menekankan GERD tidak hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai arena negosiasi normatif yang memadukan pembangunan, legitimasi politik, dan kepentingan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua pertanyaan inti: Pertama, bagaimana Ethiopia dan Mesir menggunakan norma SDG 6 dalam strategi diplomasi air mereka sepanjang sengketa GERD 2011–2024? Kedua, mengapa negosiasi Ethiopia, Mesir, dan Sudan sulit menghasilkan kesepakatan yang stabil, meskipun ketiganya sama-sama menggunakan argumen keberlanjutan dan keadilan air? Penelitian ini menggunakan lensa *hydro-politics* dan *power asymmetry* untuk menganalisis strategi diplomasi, *framing* pembangunan, dan interpretasi normatif antarnegara. Dengan pendekatan ini, artikel bertujuan menjelaskan peran SDG 6 dalam membentuk dinamika diplomasi air, menyoroti GERD sebagai arena kontestasi normatif sekaligus konflik

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

kepentingan, serta memberikan kontribusi akademik berupa perspektif yang menggabungkan geopolitik, politik air lintas batas, dan norma pembangunan berkelanjutan, sehingga memperkaya pemahaman hubungan internasional mengenai interaksi antara proyek infrastruktur besar dan rezim global terkait keberlanjutan.

LANDASAN TEORI

Kajian mengenai GERD dalam konteks hubungan internasional sering dibahas melalui pendekatan *hydro-politics,* yang memandang air sebagai sumber daya strategis yang membentuk perilaku politik negara-negara yang berbagi sungai internasional. Allan (2002) menegaskan bahwa konflik dan kerja sama dalam pengelolaan sungai lintas batas ditentukan oleh faktor politik dan ekonomi, bukan semata oleh faktor teknis. Cascão dan Zeitoun (2010) juga menunjukkan bahwa hubungan hulu–hilir pada Sungai Nil mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang timpang, di mana negara hilir memiliki pengaruh politik yang lebih besar dibandingkan negara hulu. Perspektif ini memperlihatkan bahwa pembangunan GERD tidak dapat dianalisis hanya sebagai proyek teknik, tetapi sebagai manuver politik yang menantang struktur kekuasaan lama di kawasan tersebut.

Kerangka *power asymmetry* berperan penting untuk memahami dinamika tersebut. Zeitoun dan Warner (2006) berargumen bahwa negara dengan sumber daya politik dan diplomatik yang lebih besar dapat mendefinisikan aturan dan persepsi mengenai penggunaan air yang "sah" atau "adil". Literatur tentang Sungai Nil menunjukkan bahwa Mesir telah lama memanfaatkan posisinya untuk mempertahankan hak historis atas air Nil melalui mekanisme perjanjian serta dukungan internasional (Waterbury, 2002; Tvedt, 2010). Pembangunan GERD oleh Ethiopia menantang dominasi tersebut dengan memperkenalkan realitas baru yang menggeser pusat gravitasi kekuasaan ke arah negara hulu. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa perubahan struktur kekuasaan ini menjadi alasan mengapa negosiasi antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan sering mengalami kebuntuan, karena setiap negara tidak hanya memperjuangkan distribusi air, melainkan juga mempertahankan posisi geopolitik masing-masing (Yihdego, Rieu-Clarke, & Cascão, 2017).

Selain faktor kekuasaan, dimensi normatif juga berpengaruh dalam dinamika diplomasi GERD. Kerangka *norm diffusion* yang dikembangkan Finnemore dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma global sering digunakan negara untuk melegitimasi tindakan domestik maupun kebijakan luar negeri. Studi mengenai GERD memperlihatkan bahwa Ethiopia dan Mesir sama-sama menggunakan SDG 6 sebagai sumber legitimasi, meskipun dengan penafsiran berbeda. Ethiopia membingkai GERD sebagai proyek energi

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



terbarukan yang meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sedangkan Mesir menyoroti aspek pemerataan dan risiko terhadap keberlanjutan pasokan air bagi negara hilir (Verhoeven, 2015; Arsano, 2020). Literatur ini menunjukkan bahwa norma internasional dapat berfungsi sebagai alat diplomasi yang digunakan negara untuk memperkuat klaim mereka dalam forum regional maupun global.

Konsep keamanan air (*water security*) melengkapi kerangka teori dengan menekankan bahwa air merupakan unsur vital bagi ketahanan pangan, energi, dan stabilitas sosial. Lankford et al. (2013) menyatakan bahwa ketidakpastian aliran air dapat memicu ketegangan geopolitik terutama di kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Studi tentang GERD menunjukkan bahwa negara-negara di Lembah Nil memandang air bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai elemen keamanan nasional (Swain, 2011). Karena itu, pembangunan GERD menimbulkan berbagai persepsi ancaman dan peluang yang berbeda antarnegara, sehingga memperkuat kompleksitas hubungan antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan. Literatur-literatur tersebut menjadi dasar untuk memahami bahwa konflik GERD merupakan pertemuan antara persoalan kekuasaan, kepentingan strategis, dan interpretasi norma global terkait keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelaah hubungan antarnegara dalam sengketa pembangunan GERD sepanjang periode 2011–2024. Pendekatan studi kasus dianggap tepat karena mampu menangkap dinamika politik yang kompleks, sebagaimana direkomendasikan oleh Yin (2018) dalam penelitian isu-isu hubungan internasional. Data diperoleh melalui kajian dokumen, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral, laporan organisasi internasional seperti Uni Afrika dan Nile Basin Initiative, publikasi akademik mengenai politik air dan pembangunan bendungan, serta pernyataan resmi pemerintah Ethiopia, Mesir, dan Sudan. Penggunaan beragam jenis dokumen ini memungkinkan triangulasi sumber yang meningkatkan akurasi analisis.

Teknik analisis data melibatkan beberapa tahapan. Analisis *framing* digunakan untuk membaca cara masing-masing negara membangun narasi tentang GERD dan bagaimana mereka mengaitkannya dengan SDG 6, mengikuti metode yang dikembangkan oleh Entman (1993). *Process tracing* diterapkan untuk menelusuri perkembangan negosiasi dari tahap pembangunan awal, penetapan Declaration of Principles tahun 2015, hingga upaya mediasi oleh Uni Afrika dan aktor eksternal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



mengidentifikasi titik krisis serta perubahan strategi diplomatik, sesuai rekomendasi George dan Bennett (2005) dalam studi hubungan internasional. Selain itu, analisis kekuasaan dilakukan dengan memanfaatkan kerangka *hydro-hegemony* untuk memetakan posisi tawar negara berdasarkan kapabilitas material, dukungan institusional, serta kemampuan membentuk narasi normatif (Zeitoun & Warner, 2006). Analisis normatif kemudian digunakan untuk mengkaji bagaimana SDG 6 diinterpretasi secara berbeda oleh tiap negara untuk memperkuat legitimasi diplomatik mereka.

Untuk menjaga keakuratan penelitian, penulis membandingkan berbagai sumber seperti dokumen resmi, tulisan akademik, dan laporan media internasional. Cara ini membantu memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak berasal dari satu sisi saja. Konsistensi analisis juga dijaga dengan terus merujuk pada kerangka teori yang sudah ditetapkan sejak awal, sehingga penafsiran data tetap terarah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana persoalan GERD berkembang selama lebih dari sepuluh tahun, serta bagaimana norma global seperti SDG 6 memengaruhi jalannya diplomasi air antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing SDG 6 oleh Ethiopia

Pemanfaatan norma SDG 6 oleh Ethiopia sejak awal pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) mencerminkan strategi diplomasi yang berupaya mengaitkan proyek ini dengan agenda pembangunan global. Ethiopia menggunakan SDG 6 bukan sekadar sebagai argumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik untuk memperkuat posisinya dalam konflik air dengan Mesir dan Sudan. Strategi ini tampak jelas dalam pernyataan resmi pemerintah, pidato pejabat tinggi, dokumen diplomatik di Uni Afrika, serta laporan teknis yang dipublikasikan sepanjang 2011–2024.

Dalam banyak pernyataan publik, pemerintah Ethiopia menegaskan bahwa GERD adalah bagian dari proyek nasional untuk menyediakan listrik bagi lebih dari 60% populasi yang sebelumnya tidak memiliki akses energi (EEPCO, 2018). Narasi ini selaras dengan tujuan SDG 7 tentang energi terbarukan, namun Ethiopia mengaitkannya secara langsung dengan SDG 6 dengan alasan bahwa penggunaan tenaga air adalah bentuk efisiensi sumber daya air dan tidak merugikan negara hilir. Dalam beberapa forum internasional, Ethiopia menekan bahwa GERD akan meningkatkan kapasitas negara untuk memanfaatkan air secara lebih efisien sesuai target SDG 6.4 mengenai efisiensi penggunaan air (UN Water,

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

2020). Artinya, Ethiopia membangun argumen bahwa penggunaan air untuk energi lebih sustainable dibandingkan dengan pemanfaatan untuk irigasi intensif di negara hilir, terutama Mesir yang menghabiskan lebih dari 80% suplai airnya untuk pertanian (Swain, 2011).

Strategi Ethiopia menggunakan SDG 6 juga berkaitan dengan konsep *equitable and reasonable utilization*, yang menjadi dasar argumentasi negara hulu dalam rezim sungai internasional. Ethiopia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada perjanjian kolonial yang mewajibkan negara hulu menyerahkan kontrol air kepada negara hilir, sehingga pembangunan GERD merupakan tindakan legal dan sah dalam kerangka hukum internasional (Arsano, 2020). Dengan demikian, SDG 6 digunakan sebagai pembungkus normatif yang membantu Ethiopia menolak klaim Mesir mengenai hak historis atas air Nil.

Selain itu, Ethiopia memanfaatkan SDG 6 untuk mendapatkan dukungan internasional dalam forum seperti Uni Afrika dan Nile Basin Initiative (NBI). Ethiopia menampilkan proyek GERD sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan pengurangan kemiskinan, yang menurutnya hanya dapat dicapai jika negara memiliki kapasitas energi yang cukup untuk mendukung industrialisasi (Verhoeven, 2015). Narasi ini secara konsisten muncul dalam pidato pejabat Ethiopia di PBB dan UA, termasuk dalam pernyataan bahwa GERD akan membantu menyediakan listrik bagi negara-negara tetangga, sehingga berkontribusi pada integrasi ekonomi regional (African Union, 2016). Dengan demikian, Ethiopia berusaha memperluas legitimasi internasional dengan menampilkan GERD sebagai proyek yang menguntungkan kawasan secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan domestiknya.

Bila ditinjau melalui konsep *norm diffusion* Finnemore dan Sikkink (1998), strategi Ethiopia dapat dibaca sebagai upaya *norm localization*. Negara ini tidak hanya mematuhi norma keberlanjutan secara pasif, tetapi mengadaptasinya untuk membenarkan kebijakan domestik. Ethiopia menggambarkan dirinya sebagai negara berkembang yang sedang mengejar ketertinggalan struktural, sehingga pembangunan infrastruktur besar seperti GERD merupakan bagian dari pemenuhan SDG. Dengan kata lain, Ethiopia menggunakan norma global untuk mengubah persepsi internasional dari "negara hulu yang merugikan negara hilir" menjadi "negara berkembang yang menjalankan agenda keberlanjutan".

Namun, strategi ini tidak sepenuhnya diterima secara universal. Banyak kritik interna-sional dan regional menyebut bahwa Ethiopia menggunakan SDG 6 secara selektif untuk menjustifikasi tindakan unilater-alnya, khususnya keputusan melakukan beberapa

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tahap pengisian waduk tanpa kesepakatan formal dengan Mesir dan Sudan. Meski Ethiopia menyatakan pengisian dilakukan "secara hati-hati", Mesir menganggap langkah itu bertentangan dengan target SDG 6.5 mengenai kerja sama pengelolaan air lintas batas (Yihdego et al., 2017). Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian memicu ketegangan diplomatik sepanjang periode penelitian.

Dari sisi analisis, strategi Ethiopia menunjukkan bagaimana negara hulu menggunakan SDG 6 untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi dan mengimbangi historical power asymmetry yang sebelumnya menguntungkan Mesir. Dengan memanfaatkan narasi pembangunan berkelanjutan, Ethiopia berusaha menggeser diskusi dari isu "keamanan air Mesir" menjadi isu "hak atas pembangunan". Langkah ini cukup efektif karena menarik simpati dari negara-negara berkembang lain yang menghadapi situasi serupa, terutama di Afrika Sub-Sahara.

Secara keseluruhan, *framing* SDG 6 oleh Ethiopia dapat dipahami sebagai strategi multi-level: memperjuangkan legitimasi internasional, menolak dominasi historis Mesir, dan menampilkan GERD sebagai simbol modernisasi nasional. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa norma global seperti SDG 6 dapat digunakan negara bukan hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi struktur negosiasi regional.

Framing SDG 6 oleh Mesir

Jika Ethiopia menggunakan SDG 6 untuk membangun legitimasi pembangunan, Mesir justru menempatkan SDG 6 sebagai dasar moral dan hukum untuk mempertahankan keberlanjutan aliran air Nil. Mesir berkali-kali menegaskan bahwa GERD berpotensi menimbulkan *significant harm*, terutama terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Dalam berbagai forum internasional, terutama di PBB, Uni Afrika, dan Liga Arab, Mesir menautkan ancaman GERD dengan target SDG 6.5 yang menekankan pentingnya kerja sama dalam pengelolaan air lintas batas (Egypt MFA, 2020). Bagi Mesir, Ethiopia tidak memenuhi prinsip kerja sama tersebut karena melakukan pengisian waduk secara sepihak.

Dalam nota diplomatik yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Mesir pada tahun 2019 dan 2021, Mesir menyampaikan bahwa pengurangan aliran air selama periode pengisian dapat menurunkan suplai air tahunan hingga 22%, angka yang mereka klaim dapat mengancam 7 juta hektar lahan pertanian (Egypt MoI, 2021). Narasi ini selaras dengan konsep *water security* yang melihat air sebagai sumber daya vital untuk keberlangsungan negara (Lankford et al., 2013). Mesir memanfaatkan narasi keamanan ini untuk memperkuat

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

klaimnya bahwa ancaman terhadap aliran air berarti ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan rakyat, yang secara langsung berkaitan dengan target SDG 6.1 mengenai akses air minum dan sanitasi layak.

Selain itu, Mesir menempatkan dirinya sebagai negara yang selama puluhan tahun telah mengelola air secara berkelanjutan melalui diversifikasi irigasi, reduksi *water loss*, dan program efisiensi pertanian (Waterbury, 2002). Dalam berbagai media nasional seperti *Ahram Online* dan *Egypt Independent*, pemerintah memposisikan Mesir sebagai negara yang "merawat" Sungai Nil sebagai sumber air bersama, sementara Ethiopia digambarkan sebagai aktor baru yang mencoba mengubah keseimbangan tanpa mekanisme *trust building* yang memadai. Narasi ini memperkuat argumen bahwa keberlanjutan tidak hanya menyangkut pemanfaatan air secara efisien, tetapi juga mencakup keadilan distribusi antarnegara hilir dan hulu.

Dalam kerangka teori *power asymmetry*, Mesir memanfaatkan keunggulan diplomatik historisnya untuk membawa isu GERD ke berbagai forum internasional. Mesir misalnya melobi Liga Arab agar mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung posisinya pada tahun 2020, sesuatu yang tidak dapat dilakukan Ethiopia karena organisasi tersebut didominasi negara Arab. Strategi ini menunjukkan bagaimana negara hilir yang memiliki *soft power* lebih kuat dapat menggunakan institusi internasional untuk memperkuat definisi normatif tentang apa yang dianggap penggunaan air yang adil (Zeitoun & Warner, 2006). Dalam konteks ini, Mesir mencoba menguasai ruang normatif SDG 6 untuk memastikan bahwa keberlanjutan ditafsirkan sebagai *no significant harm* kepada negara hilir.

Mesir juga sering menekankan bahwa Ethiopia belum memberikan jaminan teknis mengenai mekanisme pengurangan risiko kekeringan dan koordinasi tahunan operasi dam. Isu ini diangkat dalam pertemuan 2020 yang dimediasi Amerika Serikat dan Bank Dunia, di mana Mesir bersikeras bahwa kesepakatan harus mencakup prosedur tetap (*binding legal agreement*), sementara Ethiopia menolak mekanisme yang terlalu mengikat karena dianggap membatasi kedaulatan pembangunan nasional (US Statement, 2020). Perbedaan posisi ini memperlihatkan bahwa Mesir menggunakan SDG 6 untuk menuntut kepastian institusional dan hukum, sementara Ethiopia menggunakan SDG untuk menuntut ruang pembangunan.

Secara analitis, *framing* Mesir dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan keunggulan historisnya dalam rezim Nil. Dengan menekankan ancaman terhadap ketahanan pangan dan sosial, Mesir mengangkat GERD dari isu teknis menjadi isu eksistensial. Pendekatan ini berhasil menggalang simpati internasional, tetapi pada saat

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



yang sama memperkeras konflik karena Ethiopia merasa klaim Mesir tidak realistis dan mengabaikan potensi keuntungan bersama dari proyek tersebut.

Framing SDG 6 oleh Sudan

Posisi Sudan dalam sengketa GERD lebih kompleks karena negara ini berada di antara Ethiopia dan Mesir secara geografis maupun kepentingan strategis. Karena itulah framing SDG 6 oleh Sudan sering berubah tergantung pada dinamika politik domestik, perubahan pemerintahan, dan penilaian risiko teknis terhadap bendungan. Pada awalnya Sudan cenderung mendukung GERD karena melihat potensi keuntungan berupa pasokan listrik murah dari Ethiopia serta pengaturan aliran air yang lebih stabil bagi pertanian irigasi (Swain, 2011). Namun seiring meningkatnya kekhawatiran mengenai keamanan struktur bendungan dan risiko banjir, Sudan mulai mengambil posisi yang lebih kritis.

Dalam beberapa nota diplomatik yang dikeluarkan pada 2020–2023, Sudan menekankan bahwa Ethiopia harus memberikan data teknis harian terkait operasi bendungan agar Sudan dapat mengelola bendungan-bendungan kecil di hilir seperti Roseires Dam (Sudan MFA, 2021). Sudan memandang transparansi data sebagai bagian penting dari target SDG 6.5 mengenai kerja sama pengelolaan air lintas batas. Ketika Ethiopia melakukan pengisian tanpa data teknis lengkap, Sudan menyebut hal itu sebagai tindakan yang "membahayakan keselamatan jutaan warga di sepanjang Sungai Nil Biru".

Meski begitu, Sudan tidak sepenuhnya berpihak pada Mesir. Sudan tetap mengakui bahwa GERD memberikan peluang besar bagi stabilitas energi nasional karena negara ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap listrik yang diimpor dari Ethiopia. Posisi inilah yang menciptakan dilema: di satu sisi Sudan ingin memastikan keamanan aliran air sesuai prinsip *no significant harm*, tetapi di sisi lain negara ini membutuhkan Ethiopia sebagai mitra energi jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa framing normatif Sudan tidak sekuat Mesir atau Ethiopia, dan lebih bersifat responsif terhadap situasi teknis.

Dalam analisis media Sudan seperti *Sudan Tribune* dan *Radio Dabanga*, terlihat bahwa pemerintah sering memadukan narasi keberlanjutan dengan isu keamanan domestik. Pemerintah Sudan mengangkat SDG 6 bukan hanya sebagai norma global, tetapi sebagai kerangka untuk menuntut prosedur mitigasi risiko bagi bendungan hilir dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar sungai. Pembingkaian ini secara politik penting karena Sudan memiliki tantangan internal berupa instabilitas pemerintahan dan konflik domestik; dengan mengaitkan GERD pada SDG 6, Sudan berusaha menunjukkan bahwa pemerintah bekerja demi perlindungan rakyat.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Secara teoritis, posisi Sudan menunjukkan bagaimana negara *middle riparian* sering terjebak di antara dua kepentingan besar. Menurut Cascão (2018), negara yang berada di tengah sering memiliki kepentingan ganda: memanfaatkan keuntungan dari negara hulu sambil menghindari risiko yang biasanya dikhawatirkan negara hilir. Sudan mengekspresikan kedua kekhawatiran ini melalui penggunaan SDG 6, terutama target 6.5 dan 6.b tentang kerja sama dan partisipasi publik.

Perbedaan Kepentingan Nasional

Perbedaan kepentingan nasional antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan menjadi faktor paling mendasar yang membuat negosiasi GERD hampir selalu buntu. Walaupun ketiga negara sama-sama menggunakan SDG 6 sebagai dasar legitimasi moral, orientasi kepentingan mereka sangat berbeda dan kadang saling bertentangan. Ethiopia melihat GERD sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Listrik murah dan stabil yang dihasilkan oleh bendungan dipandang sebagai kunci industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan konsolidasi legitimasi politik internal setelah konflik domestik. Whiting (2023) menekankan bahwa ekspansi *hydropower* Ethiopia merupakan strategi politik-ekonomi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan rendah dan memperkuat kapasitas negara. Dari perspektif *hydro-politics*, GERD bagi Ethiopia bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi instrumen strategis untuk menggeser ketergantungan pada energi impor dan memperkuat kedaulatan di Sungai Nil Biru.

Mesir memiliki kepentingan yang berbeda secara fundamental. Lebih dari 97 persen air Mesir berasal dari Nil, sehingga setiap perubahan aliran dapat memengaruhi ketahanan pangan, cadangan air minum, irigasi, dan stabilitas sosial (Swain, 2011). Karena itu, Mesir menafsirkan GERD sebagai isu eksistensial, bukan proyek pembangunan. Dalam kerangka *power asymmetry*, Mesir berusaha mempertahankan posisi dominannya sebagai negara hilir yang memiliki *historical rights* atas aliran Nil (Waterbury, 2002). Kekhawatiran Mesir diperkuat oleh studi Wheeler et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengisian cepat waduk GERD dapat menurunkan cadangan air di Bendungan Aswan hingga 12–22 persen selama periode kekeringan ekstrim, mengancam produktivitas pertanian dan pasokan air kota besar. Dengan kata lain, kepentingan Mesir bersifat defensif, berfokus pada stabilitas distribusi air, sesuai dengan prinsip *no significant harm*.

Sudan berada dalam posisi yang penuh dilema karena kepentingannya bercabang. Di satu sisi, Sudan melihat GERD sebagai peluang untuk memperoleh listrik murah dan stabil, serta aliran air yang lebih teratur bagi irigasi. Ahmed dan Memon (2022) menyatakan bahwa

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



stabilisasi aliran Nil Biru berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Sudan. Namun di sisi lain, Sudan sangat khawatir terhadap risiko teknis, terutama kemungkinan kegagalan bendungan yang dapat menenggelamkan wilayah hilir seperti Sennar dan Roseires (International Rivers, 2020). Kondisi ini membuat posisi Sudan fluktuatif; terkadang mendukung Ethiopia karena manfaat listrik dan pembangunan, namun pada saat lain condong ke Mesir karena isu keamanan dan keberlanjutan aliran air. Fenomena ini menunjukkan bagaimana *middle riparian state* berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan negara hulu dan hilir (Cascão, 2018).

Perbedaan kepentingan ini menegaskan bahwa walaupun SDG 6 menekankan kerja sama dan keberlanjutan, norma global tersebut bersifat *soft* dan tidak memiliki mekanisme pemaksaan (*enforcement*). Biermann et al. (2017) menegaskan bahwa SDG 6 hanya berfungsi sebagai panduan normatif yang bergantung pada komitmen politik masing-masing negara. Dengan demikian, meskipun ketiga negara sama-sama merujuk SDG 6, orientasi kepentingan nasional yang berbeda tetap menjadi penghalang utama kerja sama.

Hambatan Teknis dan Keamanan

Hambatan teknis dalam desain dan operasional GERD juga menjadi sumber konflik utama. Salah satu isu paling kritis adalah jadwal dan volume pengisian awal (*initial filling*). Ethiopia ingin pengisian dilakukan cepat agar listrik dapat segera diproduksi secara maksimal, sementara Mesir menuntut pengisian bertahap untuk menghindari risiko kekurangan pasokan di hilir. Studi Wheeler et al. (2020) memperlihatkan bahwa pengisian cepat dapat mengurangi cadangan air di Bendungan Aswan hingga 12 persen selama tahun-tahun kekeringan, yang mengancam ketahanan pangan Mesir. Dalam perspektif *hydro-politics*, perbedaan teknis ini mencerminkan ketegangan kekuasaan: Ethiopia menggunakan kontrol teknis sebagai instrumen pembangunan dan legitimasi kedaulatan, sedangkan Mesir menggunakan kerentanan teknis untuk mempertahankan posisi tawar.

Keamanan bendungan (*dam safety*) menjadi isu lain yang sensitif. Sudan menekankan risiko kegagalan struktural GERD yang dapat membahayakan jutaan penduduk hilir, terutama di wilayah Sennar dan Roseires (Yihdego et al., 2019). Ethiopia menolak memberikan data operasional *real-time* secara penuh karena dianggap mengurangi kedaulatan dan memberikan keunggulan bagi negara hilir. Ketidakpercayaan ini memperkuat konflik politik, di mana isu teknis menjadi simbol perselisihan kekuasaan (*politicization of technical issues*).

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Selain itu, operasi tahunan GERD juga menimbulkan masalah koordinasi. GERD dirancang sebagai bendungan *hydropower*, bukan *flood-control dam*, sehingga pelepasan air bergantung pada kebutuhan produksi listrik, bukan kebutuhan aliran hilir. Mesir dan Sudan menuntut mekanisme koordinasi yang *binding*, sementara Ethiopia menolak karena dianggap membatasi kedaulatan. Cascão dan Nicol (2016) menegaskan bahwa Ethiopia historisnya menolak perjanjian yang membatasi hak pemanfaatan air sebagai negara hulu, sehingga isu teknis selalu bercampur dengan kepentingan politik. Dengan demikian, hambatan teknis tidak lagi murni teknis, tetapi menjadi arena persaingan kekuasaan (*hydro-hegemony*).

Dinamika Diplomasi Multilateral Sebagai Usaha Perdamaian

Forum multilateral seperti Uni Afrika, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Bank Dunia memainkan peran mediasi, tetapi efektivitasnya terbatas. Uni Afrika sejak 2020 mencoba mediasi dengan pendekatan "solusi Afrika untuk Afrika", namun keterbatasan kelembagaan membuat organisasi ini tidak dapat memaksakan kesepakatan (*Degefu, 2021*). Ethiopia memanfaatkan kelemahan ini untuk menegosiasikan *non-binding agreement*, sedangkan Mesir menganggap pendekatan UA terlalu lambat dan tidak efektif.

Amerika Serikat juga gagal memfasilitasi kesepakatan. Pada 2020, pemerintahan Trump dinilai berpihak ke Mesir, menekan Ethiopia agar tidak mengisi waduk secara sepihak, yang memicu kritik dari Addis Ababa dan penarikan partisipasi Ethiopia dari mediasi (Tawfik, 2021). Uni Eropa dan Bank Dunia lebih banyak menyediakan dukungan teknis, tetapi tidak memiliki otoritas politik untuk memaksa kesepakatan. Liga Arab, yang secara historis mendukung Mesir, membuat Ethiopia menolak intervensi karena dianggap tidak netral. Akibatnya, forum multilateral menjadi arena *diplomatic lobbying*, bukan penyelesaian substantif. Ketiga negara memanfaatkan SDG 6 dalam forum ini untuk memperkuat klaim normatif, tetapi tidak ada mekanisme yang mampu menyelaraskan kepentingan politik mereka.

Perbedaan Interpretasi SDG 6

Salah satu alasan mendasar kegagalan negosiasi adalah perbedaan interpretasi SDG 6. Ethiopia membaca SDG 6 sebagai legitimasi pembangunan air efisien dan berkelanjutan, menekankan target 6.4 (*water-use efficiency*) dan mengaitkannya dengan 7.2 (*renewable energy*) untuk menegaskan GERD sebagai proyek *sustainable development* dan simbol modernisasi nasional (Verhoeven, 2021). Mesir menafsirkan SDG 6 sebagai kerangka distribusional dan keamanan hilir. Target 6.5 digunakan untuk menuntut kerja sama lintas batas, menegaskan

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

prinsip *no significant harm* dan kestabilan pasokan air (Allan et al., 2019). Sudan menekankan keamanan dan koordinasi teknis, menggabungkan target 6.5 dan 6.b (*community participation*) karena posisinya paling rentan terhadap risiko teknis dan banjir (Hamza, 2020).

Dengan kata lain, walaupun SDG 6 sama-sama dirujuk, *norm convergence* tidak menghasilkan *interest convergence*. Ketiga negara memanfaatkan SDG 6 untuk legitimasi politik dan diplomasi, namun interpretasi normatif berbeda-beda sesuai kepentingan nasional, kapasitas teknis, dan posisi geografis. Inilah alasan normatif utama mengapa negosiasi tetap buntu, meskipun semua pihak mengklaim mendukung prinsip keberlanjutan.

PENUTUP

Secara keseluruhan, sengketa Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) menunjukkan bahwa konflik air lintas batas tidak hanya ditentukan faktor teknis, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, konstruksi norma, dan kepentingan politik domestik. SDG 6 yang seharusnya menjadi pedoman pengelolaan air berkelanjutan justru dimanfaatkan secara selektif oleh Ethiopia, Mesir dan Sudan untuk menguatkan posisi diplomatik masing-masing, menegaskan keterbatasan *soft law* ketika berhadapan dengan kepentingan nasional yang sifatnya strategis.

Ethiopia menggunakan narasi keberlanjutan dan kedaulatan pembangunan untuk melegitimasi GERD, sementara Mesir memposisikannya sebagai ancaman bagi keamanan air nasional. Sudan berada dalam posisi ambivalen, di satu sisi melihat manfaat teknis, namun di sisi lain khawatir terhadap risiko operasional. Perbedaan kepentingan dan minimnya kepercayaan membuat negosiasi 2011-2024 berulang kali buntu, terutama karena isu seperti pengisian waduk dan pertukaran data dipolitisasi sebagai simbol kontrol.

Keterbatasan norma keberlanjutan dan ketimpangan hulu hilir menunjukkan bahwa sengketa tidak dapat mengandalkan pendekatan teknis semata. Diperlukan pergeseran menuju *benefit sharing* yang lebih komprehensif, termasuk kerjasama energi, irigasi dan adaptasi iklim melalui kerangka *Water Food Energy Nexus.* Selain itu, mandat institusi regional seperti Uni Afrika perlu diperkuat agar mampu menjadi mediator yang lebih efektif dan memiliki daya dorong terhadap implementasi kesepakatan.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Secara keseluruhan, kasus GERD menegaskan perlunya integrasi antara norma global, kepentingan lokal, dan struktur kekuasaan regional untuk menciptakan tata kelola air lintas batas yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, A., & Memon, F. (2022). *Water security and the Nile: Opportunities and risks for Sudan*. Journal of Water Policy, 24(3), 411–429.

Allan, J. A., Keulertz, M., & Warner, J. (2019). *The hydro-political economy of the Nile*. Water International, 44(2), 136–154.

Arsano, Y. (2020). *Grand Ethiopian Renaissance Dam: Challenges and opportunities for regional cooperation*. African Journal of International Affairs, 23(1), 45–66.

Biermann, F., Kanie, N., & Kim, R. E. (2017). *Global governance by goal-setting: The novel approach of the UN Sustainable Development Goals*. Current Opinion in Environmental Sustainability, 26–27, 26–31.

Cascão, A. E. (2018). *Hydro-politics in the Nile Basin: Conflict and cooperation*. Water International, 43(2), 105–123.

Cascão, A. E., & Nicol, A. (2016). *State transformation and the politics of water in the Nile Basin*. In *Transboundary Water Governance in the Nile Basin* (pp. 125–141). Routledge.

Degefu, A. (2021). *The African Union's mediation role in the GERD dispute*. African Affairs Review, 12(1), 55–72.

Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change*. International Organization, 52(4), 887–917.

Hamza, W. (2020). *Sudan's water security dilemma and the GERD*. Sudan Journal of Political Science, 7(2), 89–110.

Swain, A. (2011). *Challenges for water sharing in the Nile basin: Changing geo-politics and changing climate*. Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tvedt, T. (2010). *The River Nile in the age of the British: Political and economic perspectives*. I.B. Tauris.

Verhoeven, H. (2015). *Water, legitimacy and power: Egypt and the Nile*. Journal of Eastern African Studies, 9(3), 465–483.

Verhoeven, H. (2021). *The political economy of the GERD and Ethiopia's developmental state*. African Studies Quarterly, 20(3), 15–37.

Wheeler, K. G., Basheer, M., Mekonnen, Z., Eltahir, E. A. B., & Dadson, S. (2020). *Cooperative filling approaches for the Grand Ethiopian Renaissance Dam*. Nature Communications, 11(5198), 1–12.

Whiting, K. (2023). *Hydropower and state-building in Ethiopia*. Journal of Eastern African Studies, 17(2), 286–305.

Waterbury, J. (2002). *The Nile Basin: National determinants of collective action*. Yale University Press.

Yihdego, Z., Rieu-Clarke, A., & Cascão, A. (2019). *The GERD and the Nile Basin: Legal and hydrological perspectives*. Water International, 44(3), 320–335.

Zeitoun, M., & Warner, J. (2006). *Hydro-hegemony—a framework for analysis of trans-boundary water conflicts*. Water Policy, 8(5), 435–460.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2310412114@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412236@mahasiswa.upnvj.ac.id